

EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2016 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)

Seri Hartati & Bahjatul Murtasidin

Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab
Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru 28292 Indonesia
email: seri.hartati@univrab.ac.id
bahjatul.murtasidin@univrab.ac.id

ABSTRACT

Youth development undertaken by the Government of Riau Province through the Office of Youth and Sports as its leading sector is a responsibility that can not be ignored. Successfull of youth development is the key to open up opportunities in other development sectors. The importance of youth development become crittical thing in this research. The goal is describing the effectiveness of youth development that has been done by related agencies in the Year 2014-2016. This research uses qualitative research method by using primary data source (through interview technique) and secondary data (documentation and other media). The theory used the effectiveness theory proposed by Martani and Lubis. Measuring the effectiveness of an organization or activity program, the author using three indicators. First, judging from the source approach (Resource Approach). Second, from the process approach (process approach). And Third, in terms of the target approach. Based on these three indicators, it can be concluded that youth development undertaken by the Riau provincial government through the Office of Youth and Sports in 2014-2016 is not optimal (less effective).

Keywords: *effectiveness, youth development, youth and sports departement*

ABSTRAK

Pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai leading sektornya merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan dalam pembangunan kepemudaan merupakan kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Pentingnya pembangunan kepemudaan ini telah penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pembangunan kepemudaan yang telah di lakukan oleh instansi terkait pada Tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer (melalui teknik wawancara) dan data skunder (dokumentasi dan media lainnya). Teori yang digunakan adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis. Untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi atau program kegiatan, ada tiga indikator. Pertama, dilihat dari sisi pendekatan sumber (Resource Approach). Kedua, dari sisi pendekatan proses (process approach). Dan Ketiga, dilihat dari sisi pendekatan sasaran (goals approach). Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2016 belum optimal (kurang efektif).

Kata Kunci: efektivitas, pembangunan kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apabila berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang kekuatan dan semangat yang begitu besar untuk perubahan (Ibranur, 2014). Mengapa demikian? Pertama, secara kuantitatif, jumlah pemuda Indonesia (tahun 2014) sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS, 2014). Dengan jumlah pemuda yang secara kuantitatif potensial ini, maka kelompok pemuda merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang penting. Kedua, pemuda memiliki jiwa yang tangguh dan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan revolusi peradaban bangsanya menuju arah yang lebih baik. Mereka (pemuda) bergerak atas nilai-nilai idealisme dan moralitas dalam melihat persoalan yang ada demi tercapainya kesejahteraan bangsanya (Ibranur, 2014). Ketiga, pemuda (dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah) merupakan aset daerah yang sangat berharga kiprahnya menuju terciptanya pemerintahan yang baik Hariyanto, 2010). Keempat, sejarah telah mengungkapkan fakta dengan jujur bahwa pemuda merupakan pelopor perubahan dan kemajuan. Berbagai perubahan yang terjadi disuatu negara, bahkan di dunia ini, pemudalah penggerakannya. Bahkan, tentang kehebatan pemuda, Allah SWT telah mengisahnkannya dalam Al-Qur'an (QS. Al-Kahfi). Selain itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaqun'alaihi juga disebutkan bahwa pemuda merupakan salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan dalam hari Kiamat.

Fakta di atas menunjukkan bahwa pemuda menempati posisi yang sangat strategis, yang mampu menciptakan hal-hal luar biasa termasuk faktor perubahan yang fundamental. Bahkan, karya monumental suatu bangsa adalah kemampuannya dalam mencetak SDM pemuda yang unggul dan kompetitif (Syukur, 2008). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghadirkan karya monumental suatu bangsa. Salah satunya adalah melalui pembangunan dibidang kepemudaan.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif pembangunan bangsa Indonesia harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menjadi tanggung jawab bersama. Untuk di Provinsi Riau, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Bidang Kepemudaan adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA). Berdasarkan pada tugas dan fungsinya sebagai *leading sector* pembangunan kepemudaan di Provinsi Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan berbagai program kegiatan (yang mengacu pada visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga) rutin setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pembangunan kepemudaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait pada Tahun 2014-2016.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2014-2016. Urgensi dari keberhasilan pembangunan kepemudaan yang efektif merupakan kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Instansi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang layanan kepemudaan dan keolahragaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan penelitian dengan teknik wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari dokumentasi-dokumentasi, media massa atau keterangan dari sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan cara analisis deskriptif.

Kontribusi Penelitian

Salah satu kontribusi terbesar dalam penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Bidang Kepemudaan (DISPORA) dalam merumuskan kebijakan tentang kepemudaan. Selain DISPORA, penelitian ini juga berkontribusi sebagai masukan kepada pihak swasta, NGO, pengusaha maupun pemerhati masalah kepemudaan dalam merumuskan / menentukan arah kebijakan bagi pemuda di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Kepemudaan

Secara legal-formal, pembangunan kepemudaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Sukmawijaya, 2015). Sedangkan pembangunan kepemudaan didefinisikan sebagai proses

memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan dan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 10/2009).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Sementara pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan ini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: *Pertama*, menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan *Kedua*, meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun strategi yang harus dilakukan meliputi: bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda, perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan, dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya (UU No. 10/2009).

Teori Efektivitas

Secara terminologi, efektivitas berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, atau dengan kata lain dapat juga dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Handayani, 1985). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Barnard, 1992).

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Agung, 2005). Kemudian, Peter Drucker mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sementara Mahsun menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi (dalam hal ini OPD) bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas salah satunya dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi; dan
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Kriteria yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis di atas menjadi acuan penulis dalam mengukur efektifitas pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2016.

HASIL PENELITIAN

Pada latar belakang di atas telah penulis uraikan bagaimana pemuda menempati “posisi dan ruang yang strategis” yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui *The World Programme of Action for Youth* juga memosisikan pemuda pada posisi yang tidak jauh berbeda. Pemuda dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*), pemuda sebagai pewaris masa depan dunia (*beneficiaries*), dan pemuda sebagai korban utama (*major victim*) akibat perubahan social (World Programme of Action for youth United Nations). Oleh karena itu, perlu kebijakan bidang

kepemudaan yang tepat agar mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan. Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan (*policy*) bidang kepemudaan harus berjenjang dan berkelanjutan di setiap level (baik nasional maupun daerah). Khusus di Provinsi Riau misalnya, pemerintah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara konsisten telah melaksanakan kebijakan pembangunan kepemudaan berdasarkan *grand design* pembangunan kepemudaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kebijakan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa karya monumental suatu bangsa adalah kemampuannya dalam mencetak SDM pemuda yang unggul dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghadirkan karya monumental suatu bangsa melalui pembangunan kepemudaan secara konsisten.

Upaya mempersiapkan dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku aktif pembangunan dimasa yang akan datang di Provinsi Riau menjadi tanggung jawab bersama, dan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Landasan dasarnya adalah Salinan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Dinas Pemuda dan Olahraga diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang layanan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Riau (Salinan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, 2009).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau telah menyusun Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2014-2018), sebagai acuan untuk melaksanakan program kegiatan pada beberapa tahun terakhir (2014-2016) sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Program Kegiatan DISPORSA Riau dan Realisasi Tahun 2014-2016

No.	Nama Program dan Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Realisasi Kegiatan		Tindak Lanjut Kegiatan	
		2014	2015	2016	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Ada	Tidak
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				√	-	-	
	- Kegiatan Pelatihan Manajemen Dakwah Bagi Da'i dan Da'iyah	√	√	-	-	-	-	√
	- Kegiatan Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	√	-	-	√	-	-	√
	- Rapat Kerja Teknis Bidang Kepemudaan	√	√	-	√	-	-	√
	- Penyusunan Profil Kepemudaan	√	√	√	√	-	-	√
	- Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Agama	-	-	√	√	-	-	√
	- Penguatan Kapasitas Moral dan Intelektual Kemandirian Pemuda	-	-	√	√	-	-	√
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					-	-	
	- Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Provinsi Riau	-	√	√	-	-	-	√
	- Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	√	-	-	√	-	-	√
	- Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	√	√	-	√	-	-	√
	- Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Nasional	√	√	-	√	-	-	√
	- Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT Kemerdekaan RI	√	√	√	√	-	-	√
	- Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau	√	√	√	√	-	-	√
	- Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara	√	√	√	√	-	-	√
	- Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara	√	√	√	√	-	-	√
	- Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Riau dan Nasional	√	√	√	√	-	-	√
	- Penyelenggaraan dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	√	√	√	√	-	-	√
	- Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan	√	√	--	√	-	-	√
	- Peningkatan Kompetensi Pelatih	√	-	√	√	-	-	√

	Pasukan Pengibar Bendera							
	- Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan	√	√	-	√	-	-	√
	- Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	√	√	-	√	-	-	√
	- Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda	√	√	√	√	-	-	√
	- Pelatihan Satuan Pramuka Peduli	√	-	√	√	-	-	√
	- Pelatihan Pelatih Pembina/Fasilitator Relawan Indonesia se Provinsi Riau	√	-	√	√	-	-	√
	- <i>International Youth Summit</i>	-	-	√	√	-	-	√
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda							
	- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	√	√	√	√	-	√	-
	- Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda	√	√	√	√	-	√	-
	- Pengembangan Kerajinan Unggulan Daerah Bagi Pemuda se Provinsi Riau	√	-	-	√	-	-	√
	- Penguatan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda	-	-	√	√		√	-
4	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba							
	- Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba HIV/AIDS bagi Pemuda	√	√	-	√		-	√
	- <i>Training of Trainer</i> Pemuda Anti Narkoba	-	-	√	√		√	-

Sumber : Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Dari Tabel 1 di atas, terdapat beberapa perbedaan bentuk dan nama kegiatan serta realisasi tahun pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan (atau perubahan) anggaran (APBD) Pemerintah Provinsi Riau. Implementasi program bidang kepemudaan yang telah dilaksanakan, lalu penulis ukur tingkat efektivitasnya melalui tiga indikator. Pertama, dilihat dari sisi pendekatan sumber (*resource approach*). Kedua, dari sisi pendekatan proses (*process approach*). Dan ketiga, dilihat dari sisi pendekatan sasaran (*goals approach*).

Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan Sumber (*resource approach*) merupakan sebuah pendekatan yang mencoba mengukur efektivitas dari sisi input organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi (termasuk kebijakannya) mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan output yang dihasilkan juga akan kembali lagi kepada lingkungan. Dalam *grand design* pembangunan kepemudaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, pembangunan kepemudaan harus melibatkan peran dan partisipasi pemuda dalam semua tahap secara penuh. Mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program (Susilo, 2015). Jika dilihat pada pendekatan dan tahapan ini, budaya yang dibangun oleh instansi terkait hanya melibatkan pemuda pada tahap pelaksanaan kegiatan objek sasaran penerima manfaat saja, belum banyak yang dilibatkan dalam perencanaan, terlebih lagi dalam tahapan penganggaran. Padahal, idealnya keterlibatan pemuda (dalam proses input) harus memperhatikan dan melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program kegiatan.

Proses perencanaan yang penulis dimaksud adalah proses awal perumusan rencana program kegiatan. Pada fase ini, penulis tidak menemukan adanya keterlibatan pemuda atau organisasi pemuda sebagai perwakilan yang ikut serta dalam proses ini. Ketidakterlibatan pemuda atau perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) pada tahapan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena ketidaktahuan pemuda terhadap proses ini (kurang pro aktif), dan kedua, pengelola program atau pemerintah belum cukup transparan dalam membuka dan menarik keterlibatan pemuda. Perencanaan pembangunan masih dianggap menjadi domain internal instansi yang bersangkutan, padahal perencanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama kaum muda. Akibatnya, posisi pemuda tetap sebagai objek, bukan subjek pembangunan.

Pada sisi yang lain, proses penetapan bentuk kebijakan (program kegiatan) yang dilakukan oleh instansi terkait juga kurang optimal karena lemahnya kemampuan dalam perumusan kebijakan yang *vision oriented*. Pembangunan kepemudaan tidak bisa lepas dari kompleksitas pertumbuhan dan permasalahan pemuda. Pertanyaannya adalah sejauh mana pertumbuhan dan permasalahan kepemudaan tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah, dalam hal ini Bidang Kepemudaan Dispora Provinsi Riau sebagai *leading sector* pembangunan kepemudaan. Sehingga program kegiatan yang disusun mampu meminimalisir persoalan pemuda yang ada. Lemahnya peran instansi terkait dalam proses penetapan bentuk kebijakan (program kegiatan) ini disebabkan oleh tidak adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (*Youth Development Index*) di Provinsi Riau. Indeks Pembangunan Kepemudaan memiliki fungsi, yaitu: mengukur perkembangan pemuda dari waktu ke waktu, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, membandingkan kemajuan antar provinsi/daerah, dasar bagi perumusan kebijakan, dan mendorong pengumpulan data yang berkaitan dengan pemuda (Musthofa dan Anom, 2014). Melalui Indeks Pembangunan Kepemudaan (*Youth Development Index*) pemerintah bisa mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pemuda, sehingga memudahkan pengambil kebijakan untuk merumuskan program-program kepemudaan. Selain itu, akan terumuskan bingkai analisis yang memetakan dan memahami keberadaan pemuda. Hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam proses pembangunan kepemudaan..

Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan harus dilakukan secara

berjenjang dan terpadu. Walaupun berjenjang dan terpadu, konsep pembangunan kepemudaan ini terus bergerak dan berubah seiring dengan perubahan waktu. Seperti misalnya era milenial saat ini, generasi millennial memiliki tantangan yang sangat kompleks. Ketergantungan akan internet dan produk digital telah membuat generasi millennial sering dicap sebagai generasi instan, generasi copas (*copy paste*), dan tidak mahu *ribet* (susah). Akibatnya, pemuda tidak lagi mampu memainkan peranannya sebagai tembok peradaban. Pemuda terkungkung dalam penjara hedonisme semu, yang merenggut nilai-nilai kemanusiaannya. Pemuda terperangkap dalam kubangan pragmatisme materi yang menjauhkan pada nilai kediriannya. Sosoknya tidak lagi mampu menjadi topangan soko guru pembangunan peradaban, namun sebaliknya pemuda menjadi sumber persoalan bagi peradaban (Wibawa 2013). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda dan fenomena ini. Pelayanan yang bervisi kepemudaan dengan pendekatan partisipasif perlu dilakukan.

Realita yang penulis temukan menunjukkan bahwa proses pembangunan kepemudaan tidak berada pada jalur/poros yang ideal. Mengapa demikian? Sekalipun ada *hearing* yang melibatkan keterwakilan pemuda, kerap kali hanya sebatas formalitas dan tumpul dalam tindak lanjut. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda hanya sebatas pada kepesertaan dan sasaran penerima manfaat. Bahkan, pada beberapa kegiatan terdapat peserta yang sama sebagai peserta pada kegiatan lain yang lakukan.

Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran (*goal approach*) dalam pengukuran efektivitas organisasi memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, yaitu mengukur keberhasilan dalam usaha mencapai tingkatan *output* yang direncanakan (Lubis dan Martani, 1987). Lalu, bagaimana dengan aspek *output* program kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan? Dari temuan penulis dapat dijelaskan bahwa meskipun

realisasi pembangunan kepemudaan tiap program cukup tinggi (hampir 100% terealisasi), namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Penyebabnya adalah pertama, pemuda hanya sebatas pada kepesertaan dan sasaran penerima manfaat. Kedua, dalam tabel 1 diatas tertera dengan sangat jelas bahwa rata-rata kegiatan yang dilaksanakan kurang berorientasi pada *output* kegiatan melainkan sebatas pada tingkat realisasi kegiatan.

Dari beragam kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014-2016, hanya pada Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan yang memiliki tindak lanjut kegiatan. Sebagai contohnya, pasca mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan, seluruh peserta diikutkan kembali pada kegiatan pembinaan dan pengembangan wirausaha. Sifat ataupun model kebijakan yang berkelanjutan ini tidak ditemukan pada kegiatan-kegiatan selain kewirausahaan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan yang tidak memiliki tindak lanjut kegiatan. Kalaupun ada, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya, proses evaluasi jarang dilakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pembangunan kepemudaan.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa temuan penting.

1. Pertama, budaya yang dibangun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau hanya melibatkan pemuda pada tahap pelaksanaan kegiatan atau sebagai objek sasaran penerima manfaat. Padahal, idealnya keterlibatan pemuda (dalam proses *input*) harus memperhatikan dan melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program kegiatan. Pada sisi yang lain, proses usulan dan penetapan bentuk program kegiatan yang

dilakukan oleh instansi terkait juga kurang optimal karena lemahnya kemampuan dalam perumusan kebijakan yang *vision oriented*. Lemahnya peran instansi terkait dalam proses usulan dan penetapan bentuk program kegiatan ini disebabkan oleh tidak adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (*Youth Development Index*) di Provinsi Riau. Indeks Pembangunan Kepemudaan ini penting karena memiliki fungsi, yaitu: mengukur perkembangan pemuda dari waktu ke waktu, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, membandingkan kemajuan antar provinsi/daerah, dasar bagi perumusan kebijakan, dan mendorong pengumpulan data yang berkaitan dengan pemuda. Melalui Indeks Pembangunan Kepemudaan (*Youth Development Index*) pemerintah bisa mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pemuda, sehingga memudahkan pengambil kebijakan untuk merumuskan program-program kepemudaan.

2. Kedua, proses pembangunan kepemudaan di Provinsi Riau tidak berada pada jalur/poros yang ideal. Karena jikapun ada *hearing* yang melibatkan keterwakilan pemuda, kerap kali hanya sebatas formalitas dan tumpul dalam tindak lanjut. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda hanya sebatas pada kepesertaan dan sasaran penerima manfaat. Bahkan, pada beberapa kegiatan terdapat peserta yang sama sebagai peserta pada kegiatan lain yang lakukan
3. Ketiga, meskipun realisasi pembangunan kepemudaan tiap program cukup tinggi (hampir 100% terealisasi), namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Kegiatan yang dilaksanakan kurang berorientasi pada output kegiatan melainkan sebatas pada tingkat realisasi kegiatan.

4. Dari ketiga temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2016 belum optimal (kurang efektif).

REKOMENDASI

Dari uraian dan temuan penelitian di atas, penulis merekomendasikan hal-hal berikut :

1. Pemerintah perlu menerapkan Model Pembangunan Pemuda Berkelanjutan berbasis *Youth Visionary-Services* sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
2. Pemerintah perlu membuat Indeks Pembangunan Kepemudaan (*Youth Development Index*); dan
3. Pemerintah perlu melakukan pengarusutamaan pemuda (*Youth Mainstreaming*).

REFERENSI

- Agung, K. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Arif Musthofa, R. F dan Khairul Anom. 2014. *Rekomendasi dan Siasat: Kemenpora dan Pemuda Menuju Revolusi Mental*, Cetakan Pe. Jakarta: Asdep Organisasi Kepemudaan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia*. 2014.
- Barnard I., C. 1982. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*. Jakarta: Gramedia
- Handyaningrat, S. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Hariyanto. 2010. *Etika Perjuangan Kaum Muda*, Cetakan Pertama. Jakarta: Asdep

Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Ibanur, A. 2014. *Seri Pemberdayaan Pemuda III: Pemuda Bangkit Indonesia Bahagia*. Jakarta: Asdep Organisasi Kepemudaan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Lubis dan Martani. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2014-2018.

Salinan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Sukmawijaya, Esa. "Analisis Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan di Indonesia," *SIPATAHOENAN: Southeast-Asian Journal for Youth, Sports and Health Education*, Vol. 1, No. 2 October 2015, hal. 165–188.

Susilo, Dwi Agus. 2015. *Pemuda dan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Jangka Indonesia.

Syukur, A. 2008. *Perekat Bangsa, Pengakuan Sejarah Kepemudaan Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara.

Undang-undang Nomor 40 Tentang Kepemudaan Tahun 2009.

Wibawa, Lutfi. 2013. "Pemberdayaan Pemuda Melalui Social Capital," *Proceeding Seminar Nasional "Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial*. Yogyakarta: UNY.

WORLD PROGRAMME OF ACTION FORYOUTH UNITED NATIONS.